

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG SESUAI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



Oleh :

REYNALDI MEIDI MUSSU

NIM : 17051044
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG SESUAI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



Oleh :

REYNALDI MEIDI MUSSU

NIM : 17051044
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
BARANG SESUAI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)**

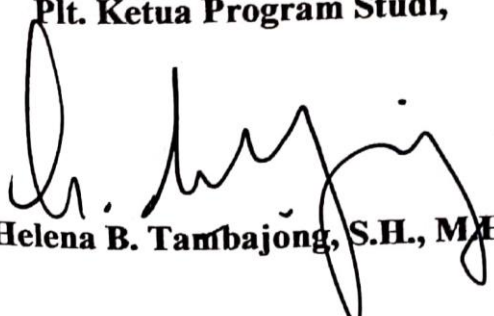
Nama : Reynaldi Meidi Mussu
NIM : 17051044
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan
LULUS pada tanggal 23 Juli 2021

Manado, 23 Juli 2021

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Dekan,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
BARANG SESUAI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)**

Diajukan oleh:

Reynaldi Meidi Mussu
17051044

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 21 Juli 2021**

Dosen Pembimbing Utama



James V. L. Pontoh, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping



Steven Y. Pailah, S.H., M.Si

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
BARANG SESUAI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)**

Nama : Reynaldi Meidi Mussu
NIM : 17051044
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan
LULUS pada tanggal 23 Juli 2021

TIM DOSEN PENGUJI



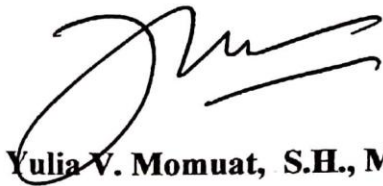
James V. L. Pontoh, S.H., M.H.
Ketua



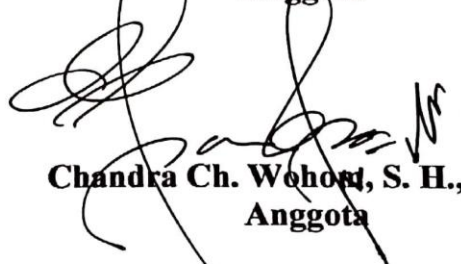
Steven Y. Pailah, S.H., M.Si
Anggota



Annita T. S. F. Mangundap, S. H., M.H
Anggota



Yulia V. Momuat, S.H., M.Hum
Anggota



Chandra Ch. Wohott, S. H., M. Hum
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Dekan



Helena B. Pambajong, S.H., M.H

MOTTO

**DISETIAP USAHA YANG DILAKUKAN DENGAN BAIK
PASTI AKAN ADA HASIL YANG BAIK
JALANI, NIKMATI, DAN SYUKURI**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Mama, Papa, Adik Nio dan Adik Hana, karena selalu mendoakan, memberikan motivasi dan juga selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRACT

Reynaldi Meidi Mussu (17061044) Year. 2021, LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF EMBEDDING OF GOODS IN ACCORDANCE WITH THE CRIMINAL CODE, Advised by James V.L. Pontoh, S.H., M.H. and Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Embezzlement of goods that often occurs in the society is an act that violates the Criminal Code or in other words, embezzlement of goods is a crime. People who commit crimes must be punished according to the applicable rules. The embezzlement of goods is increasing each year, this is caused by the numbers of life's necessities factor that must be met by the society and the insufficiency of criminal term for embezzlement cases that leads to the increasing crime of embezzlement of goods. The problem of this research is how to administer the law to the crime of embezzlement and how to form the accountability of the crime of embezzlement of goods offenders. The purpose of this study is to determine law enforcement against the crime of embezzlement and the form of accountability of the crime of embezzlement of goods offenders. The author in analysing the problems that occurs in this research used the normative legal method, which in the end can be concluded that law enforcement against the crime of embezzlement is in accordance with the legal provisions in the Article 372 of the Criminal Code and the form of accountability of the offenders of the crime of embezzlement must be in accordance with the court's decision that arbitrates the case and refers to the Article 372 of the Criminal Code. The author suggested that the judge's decision on the cases of criminal acts of embezzlement of goods should be more appropriate where the decision must be more extensive thus there would be deterrent effect for each convict and for the society to be discouraged from committing criminal acts, in this case the crime of embezzlement.

Keywords: Law Enforcement, Embezzlement, Goods.

ABSTRAK

Reynaldi Meidi Mussu (17051044) Thn. 2021, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG SESUAI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, dibimbing oleh James V.L. Pontoh, S.H., M.H. dan Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Penggelapan barang yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dengan kata lain penggelapan barang merupakan suatu tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggelapan barang setiap tahun semakin meningkat, hal ini dikarenakan faktor banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat serta kurangnya jangka waktu pemidanaan dari kasus penggelapanlah yang mengakibatkan meningkatnya tindak pidana penggelapan barang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan barang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan serta bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana penggelapan barang. Penulis dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sesuai dengan ketentuan hukumnya yang terdapat dalam pasal 372 KUHP dan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana penggelapan harus sesuai dengan putusan pengadilan yang mengadilinya serta melihat dalam pasal 372 KUHP. Sara penulis kiranya putusan hakim terhadap kasus-kasus tindak pidana penggelapan barang harus lebih ditingkatkan lagi dimana putusannya harus lebih tinggi lagi agar adanya efek jera bagi setiap terpidana serta agar masyarakat menjadi takut untuk melakukan tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana penggelapan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penggelapan, Barang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi ini menjadi salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan Strata Satu (S1).

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut serta memberikan bimbingan, dukungan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik :

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Fakultas Hukum;
4. James V. L. Pontoh, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi;
5. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Pendamping Skripsi;
6. Dr. Valentino Lumowa selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Mama, Papa, Adik Nio dan Adik Hana yang selalu mendoakan serta menyemangati dan memberikan motivasi selama ini;
8. Zefanya Veronica Patricia Surya yang selalu membantu dan memberi dukungan;

9. Sahabat-sahabat penulis yang membantu dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Manado, 23 Juli 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Reynaldi Meidi Mussu

DAFTAR ISI

SAMPUL COVER	i
SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Asas Hukum Pidana	7
B. Hukum Pidana.....	7

1. Pengertian Hukum	7
2. Pengertian Hukum Pidana	8
3. Pembagian Hukum Pidana	9
4. Tujuan Hukum Pidana	9
C. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Delik	10
2. Macam-Macam Delik	10
3. Unsur-Unsur Delik.....	12
D. Penggelapan.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	13
2. Macam-Macam Penggelapan	13
E. Penegakan Hukum	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Sumber Data	17
C. Metode Pengumpulan Data.....	18
D. Metode Analisis Data	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
A. Penegakan Hukum Bagi Setiap Orang Yang Melakukan Penggelapan	19

B. Bentuk Pertanggungjawaban Setiap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan	
Barang.....	27
BAB V PENUTUP	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....	36

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 23 Juli 2021

Yang menyatakan,



Reynaldi Meidi Mussu